

# Dekolonisasi Politik Perempuan Indonesia

Oleh : Brigida Intan



pilar penting demokrasi mempunyai peranan yang sangat penting untuk mewujudkan partisipasi politik perempuan yang lebih luas dan bermakna.

## Hambatan-hambatan

Secara normatif, tidak ada peraturan perundang-undangan dalam bidang politik yang mendiskriminasi perempuan. Namun, faktanya tingkat representasi perempuan di parlemen kurang terwakili. Hal ini terjadi karena berbagai faktor diantaranya. *Pertama*, pola kebiasaan masyarakat yang tidak melepaskan adat istiadatnya. Beberapa sistem pemerintahan feodalistik di beberapa suku di Indonesia menunjukkan kurangnya dukungan terhadap perempuan.

*Kedua*, sebagian besar perempuan memiliki ketergantungan ekonomi. Ketergantungan ini yang membuat perempuan lemah dalam berbagai aspek termasuk kemandirian dalam mengambil keputusan, akses sosial, politik dan kesempatan untuk mengembangkan diri.

*Ketiga*, kurangnya keinginan perempuan dalam berpolitik. Saat ini, kebebasan perempuan untuk terjun ke dunia politik sudah dijamin secara tegas dalam perubahan peraturan perundang-undangan politik.

*Keempat*, masih sedikit partai politik yang mengalami kader perempuan. Umumnya partai politik belum memiliki kader perempuan yang mempunyai potensi yang cukup besar dan memadai untuk dapat diandalkan sebagai kader guna menunjang struktur organisasi kelembagaan politik yang berkualitas.

*Kelima*, belum tersusunnya modul pendidikan politik yang mengandung muatan atau substansi berdasarkan prinsip prospektif gender secara nasional maupun substansi gender secara regional, internasional atau global.

*Keenam*, kurangnya komunikasi politik. Jalinan mata rantai yang komunikatif antar institusi politik perempuan baik antar pemerintah, pusat, daerah, masyarakat, dan media untuk menghimpun kekuatan politik belum terbangun. Perjuangan perempuan untuk mendapatkan peran politik masih dilakukan sendiri-sendiri tanpa dukungan yang terintegrasi.

Berdasarkan hasil survei WRI (Woman Research Institute) tahun 2014 menyatakan, masyarakat Indonesia setuju jika masyarakat diberi kesempatan yang sama untuk terlibat di bidang politik. Yang dibahas dalam survei tersebut salah satunya pentingnya partisipasi perempuan dalam politik.

## Upaya representasi perempuan

Perempuan Indonesia yang tergabung dalam politik mampu membawa aspirasi rakyat dan memperjuangkan. Selain menggunakan perasaan kemanusiaan, juga dipertahankan pola pikir rasional dalam membangun bangsa. Hal yang dapat dilakukan yang pertama, membangun dan memperkuat hubungan antar jaringan dan organisasi perempuan. Di Indonesia, saat ini ada beberapa asosiasi besar organisasi perempuan. Misalnya, Kowani adalah federasi dari 78 organisasi perempuan, yang

bekerjasama dengan perempuan dari berbagai agama, etnis, dan organisasi profesi berbeda. Pengembangan jaringan-jaringan organisasi wanita, dan penciptaan sebuah sinergi usaha. Ini penting untuk mendukung perempuan di parlemen atau yang sedang berjuang agar terpilih masuk parlemen.

*Kedua*, meningkatkan representasi perempuan dalam organisasi partai-partai politik dengan tujuan mengupayakan agar dapat duduk pada posisi-posisi strategis dalam partai, atau di lingkup desa seperti jabatan sekretaris, karena posisi ini berperan dalam memutuskan banyak hal tentang kebijakan partai.

*Ketiga*, melakukan advokasi para pemimpin partai-partai politik, dengan tujuan menciptakan kesadaran tentang pentingnya mengakomodasi perempuan di parlemen, terutama mengingat kenyataan bahwa mayoritas pemilih Indonesia adalah perempuan.

*Keempat*, meningkatkan pemahaman dan kesadaran perempuan melalui pendidikan dan pelatihan. Ini perlu untuk meningkatkan rasa percaya diri perempuan pada kemampuannya. Pada saat yang sama, perlu disosialisasikan konsep bahwa arena politik terbuka bagi semua warga negara, dan bahwa politik bukan arena yang penuh konflik dan intrik yang menakutkan. Ini pernah dilakukan Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) DIY pada tahun 2008 yang melakukan pemberdayaan perempuan di bidang politik melalui media sosialisasi UU Pemilu.

*Kelima*, meningkatkan kualitas perempuan yaitu dengan meningkatkan akses terhadap fasilitas ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Ini dilakukan sesuai dengan kapasitas kualitatif perempuan di parlemen, karena proses rekrutmen politik sepatutnya dilakukan atas dasar merit sistem.

*Keenam*, memberi kuota untuk meningkatkan jumlah anggota parlemen perempuan. Sesuai UU No 10 tahun 2008 tentang Pemilu yang mensyaratkan kuota 30% perempuan bagi peserta pemilu. Ini merupakan langkah *affirmative action* yang baik.

Harapan akan terjadinya dekolonisasi politik partisipasi perempuan Indonesia semakin nyata. Semakin banyak pejuang-pejuang perempuan yang terwakilkan aspirasinya, sehingga selalu siap tidak hanya melaksanakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga tetapi juga mewujudkan pembangunan bangsa. \*\*\*

**Brigida Intan, M.Pd.**

Dosen Pendidikan Sejarah FKIP  
UDS Yogyakarta